

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KREDIT
PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),TBK.
UNIT KOTA PINANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Akuntansi*



Oleh :
APRILLIA KARTIKA
NPM : 1305170259

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Aprillia Kartika. 1305170259. Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Unit Kota Pinang, 2017. Skripsi.

Latar belakang penelitian ini adalah perusahaan sebagai penyalur kredit kepada nasabah terkadang mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau kredit macet. Untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah maka diperlukan sistem pengendalian intern yang baik. Manajemen perusahaan harus mempunyai sistem pengendalian intern yang baik agar dapat menjamin keamanan harta maupun data perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan sistem pengendalian intern kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang dan Untuk mengetahui apakah peranan sistem pengendalian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang sudah sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel penelitian adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dengan cara membandingkan sistem pengendalian intern kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang dengan sistem pengendalian intern menurut COSO, sistem pengendalian intern kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang belum mencapai tujuan dari sistem pengendalian intern. Hal ini dikarenakan ada beberapa unsur sistem pengendalian intern kredit pada perusahaan belum berjalan dengan baik.

Kata kunci :Sistem Pengendalian Intern, Kredit.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprillia Kartika

NPM : 1305170259

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero), Tbk Unit Kota Pinang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan skripsi adalah benar saya peroleh dari Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kota Pinang dan apabila ternyata dikemudian hari data-data skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka, dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, Januari 2017

Penulis

APRILLIA KARTIKA

1305170259

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis. Shalawat beriringkan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal dengan judul "Analisis penilaian Pemberian Kredit dalam Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kota Pinang" guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan proposal ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kondisi yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan proposal ini dan menambah pengetahuan penulis dimana yang akan datang.

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian proposal ini penulis banyak mendapatkan bantuan seperti materil dan spiritual baik berupa bimbingan, dorongan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dari kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak antara lain kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang MUHAMMAD SALEH dan Ibunda tercinta BUDI ASTUTI yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta

do'a restu yang tulus terhadap sebagai suatu bentuk motivasi yang besar bagi Penulis dalam menyelesaikan pembuatan laporan magang ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.Irfan S.E, M.M selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya proposal ini.
6. Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Staff dan Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kota Pinang.
8. Seluruh teman seperjuangan di kelas VII G Akuntansi Pagi, terima kasih pengalaman selama 3 tahun yang penulis lalui dengan kalian.
9. Kepada teman-teman terbaik Gusmitasari, Dewi Wahyuni, Sofia Ranti, Yossy Fadhillah dan Arini. Terima kasih atas segala dukungannya selama ini.

Saya menyadari masih banyak hal yang kurang dalam penulisan proposal ini, untuk itu kritik dan saran dari rekan-rekan dan semua pihak yang sifatnya untuk penyempurnaan proposal ini sangat saya harapkan.

Akhir kata penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi rekan sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Medan, Januari 2017

Penulis

APRILLIA KARTIKA
Npm: 1305170259

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Sistem Pengendalian Intern.....	8
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern	8
b. Tujuan Pengendalian Intern.....	10
c. Unsur-unsur Pengendalian Intern	11
2. Kredit.....	13
a. Pengertian Kredit.....	13
b. Tujuan Kredit.....	14
c. Fungsi-fungsi Kredit.....	16
d. Unsur-unsur Kredit	17
e. Aspek-aspek Penilaian Kredit.....	19
f. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	20

g. Faktor Penting Kebijakan Kredit.....	21
h. Prosedur Dalam Pemberian Kredit.....	22
3. Penelitian Terdahulu	26
B. Kerangka Berfikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Definisi Operasional Variabel.....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	32
a. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia	32
b. Aktivitas Usaha	35
c. Struktur Organisasi	37
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern	42
B. Pembahasan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel III-1 Waktu Penelitian.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	27
Gambar IV. I Struktur Organisasi	41
Gambar IV. II <i>Flowcart</i> Pemberian Kredit	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dimana bank memiliki beberapa fungsi, salah satunya *agent of trust*. *Agent of trust* berarti dalam kegiatan usahanya bank mengandalkan kepercayaan (*trust*) masyarakat. Masyarakat percaya uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, akan dikelola dengan baik dan bank tidak akan bangkrut. Melalui kelebihan dana tersebut bank dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam bentuk kredit. Dari aktivitas tersebut tersalurkan berbagai produk bank sesuai dengan kebijakan-kebijakan bank tersebut.

Aktivitas perbankan yang utama yaitu kegiatan *funding* atau menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, giro dan lainnya. Kegiatan kedua yang dilakukan oleh bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan usaha atau sering disebut pinjaman yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*)

Kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama. Semakin besar tingkat penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, maka semakin besar pula jumlah investasi yang dimiliki perusahaan. Adanya penjualan kredit yang dilakukan, dapat mengurangi kemungkinan resiko seperti biaya penambahan pegawai dan pengurusan administrasi. Oleh karena itu, sebelum melakukan

pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral and condition*.

Analisis kredit perlu dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui seberapa besar resiko pinjaman macet, yang dilihat dari kesanggupan dan kesungguhan calon nasabah tersebut untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh bank sesuai dengan persyaratan. Analisis kredit ini juga dilakukan untuk mengetahui masa lalu calon nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan pada lembaga perbankan yang sebelumnya menangani usaha calon nasabah tersebut untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh bank sesuai dengan persyaratan.

Menurut Kasmir (2012:289) menyatakan bahwa : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

Menurut Henny (2011) menyatakan untuk mencegah terjadinya resiko kredit UU perbankan mengharuskan bank untuk menerapkan asas-asas pengkreditan yang sehat. Salah satunya dengan melakukan penilaian kredit yaitu menilai watak (*character*) yaitu keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral ataupun sifat-sifat pribadi yang baik, kemampuan (*capacity*) yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi hutangnya dari kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukan, modal (*capital*) yaitu jumlah dana atau modal dasar yang dimiliki oleh calon debitur, agunan (*collateral*) yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur

sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya, dan kondisi ekonomi (*condition*) dari calon debitur

Kegiatan perkreditan selalu menjadi hal yang sangat diperhatikan dikarenakan kegiatan perkreditan merupakan kegiatan menyalurkan dana masyarakat. Perusahaan sebagai penyalur kredit kepada nasabah terkadang mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau kredit macet. Faktor yang bisa menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah meliputi faktor eksternal dan internal dari lembaga keuangan tersebut. Faktor eksternal seperti pihak nasabah dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajiban kepada bank atau lembaga keuangan sehingga kredit yang diberikan macet atau ada unsur tidak sengaja dimana debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu misalnya nasabah yang dibiayai mengalami musibah seperti kematian, kena hama, banjir dan kebangkrutan usaha. Faktor internal berasal dari karyawan yaitu dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diperidiksi sebelumnya.

Menurut mulyadi (2013:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Tabel I. I
Total Kredit Yang Diberikan dan Total Kredit Macet
Tahun 2012-2016

Tahun	Total Kredit Yang Diberikan	Total Kredit Macet
2012	Rp. 63.870.986.714	Rp. 1.956.168.288
2013	Rp. 51.580.115.607	Rp. 970.192.980
2014	Rp. 59.964.052.088	Rp. 1.223.557.450
2015	Rp. 66.982.782.069	Rp. 3.399.406.426
2016	Rp. 64.085. 737.975	Rp. 1.609.024.016

Berdasarkan observasi yang penulis temukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kota Pinang bahwa sebagian nasabah mengalami proses kredit macet sehingga kesanggupan nasabah untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan tidak berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa alasan yang dikemukakan nasabah. Dapat juga terjadi karena pihak analisis kredit kurang efektif dalam menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga analisis dilakukan secara subjektif, untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet atau bermasalah maka diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang baik. Selain itu, pihak pegawai kurang memperhatikan penerapan penilaian kredit yang diukur dari *character*, *capacity*, *capital*, *colecterall*, dan *condition* nasabah untuk melakukan pemberian kredit kepada nasabah. Fenomena lain juga ditemukan kurangnya penanganan yang tegas kepada nasabah yang menunggak lebih dari 90 hari sampai waktu yang disepakati mengakibatkan tingkat kolektibilitas mengalami kenaikan. Sedangkan,

kolektibilitas yang mengalami kenaikan akan mengakibatkan tingginya tingkat resiko.

Hal ini tidak bersesuaian dengan teori COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) pada lima komponen pengendalian intern yaitu terkait dengan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang perlu diambil untuk menghadapi resiko-resiko yang tersangkut pada pencapaian tujuan.

Sebelum melakukan kredit, bank seharusnya merasa yakin kredit yang diberikan benar-benar kembali, keyakinan itu diperoleh dari penilaian kredit dapat dilakukan dengan prinsip 5 C, yaitu: dari *character, capacity, capital, colectorall*, dan *condition* nasabah (Kasmir, 2014)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti mengambil judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kota Pinang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak internal dalam menganalisis pemberian kredit berdasarkan unsur 5 C, yaitu: dari *character, capacity, capital, colectorall*, dan *condition* nasabah sehingga terjadi kredit macet.
2. Kurangnya pengawasan dan penanganan yang dilakukan terhadap nasabah yang mengalami tunggakan lebih dari 90 hari sehingga

mengakibatkan meningkatnya tingkat kolektibilitas dan pengendalian resiko yang tidak efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pengendalian intern kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kota Pinang ?
2. Apakah sistem pengendalian intern kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kota Pinang sudah sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kota Pinang.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kota Pinang sudah sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern.

Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengendalian intern dan peranannya terhadap efektifitas kredit dan untuk mengetahui sejauh mana kaitan antara teori dengan penerapannya.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang dapat memberikan manfaat dalam mengelola sistem pengendalian intern kredit sehingga tujuan kreditnya dapat tercapai dan dilakukan secara efektif.

3. Bagi pihak lain

Dapat menjadi referensi dan panduan dalam melanjutkan penelitian ini dimasa yang akan datang, khususnya penelitian mengenai sistem pengendalian intern kredit.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Perusahaan menggunakan pengendalian intern untuk mengarahkan operasi dan mencegah penyalahgunaan sistem. Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam mencapai tujuan usaha. adapun beberapa pengertian tentang pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian intern merupakan proses pengendalian intern adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern bukan merupakan tujuan. Pengendalian merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat perpasive dan menjadi bagian yang tak terpisahkan, bukan hanya sekedar tambahan dari infrastruktur entitas.
- b. Pengendalian intern dilakukan oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijaksanaan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan direksi, manajemen dan personalia lain berperan didalamnya.
- c. Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan direksi perusahaan. hal ini disebabkan karena keterbatasan bawahan yang melekat dalam semua system pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam mencapai tujuan pengendalian.

- d. Pengendalian intern disesuaikan dengan pencapaian tujuan didalam kategori pelaporan keuangan,kepatuhan dan operasi yang saling melengkapi

Jadi dapat disimpulkan bahwa,pengendalian intern merupakan suatu proses yang dilaakukan untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari berbagai kebijakan, prosedur,teknik,peralatan fisik,dokumentasi dan manusia

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*).
Pengendalian intern merupakan bagian dari system pengendalian intern meliputi struktur organisasi ,metode, dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan investor dan kreditor yang ditanamkan oleh perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
- b. Pengendalian intern administrative meliputi struktur organisasi , metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut mulyadi dalam bukunya auditing (2008:181) tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- a. Keandalan informasi keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektifitas dan efisiensi operasi

b. Tujuan Pengendalian Intern

Alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam tiga golongan yaitu : keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Mulyadi (2002: 165) berpendapat bahwa : tujuan pengendalian intern adalah memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga golongan tujuan, yaitu :

a. Keandalan pelaporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.

b. Efektifitas dan efisiensi operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Perusahaan publik, non publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil.

Sedangkan yang terkait akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

c. Unsur - Unsur Pengendalian Intern

Menurut AICPA (*American institute of certifiield public accountants*) dalam SAS (*statement on auditing standards*) no 78 yang terdapat dalam standar profesi akuntan public menyatakan bahwa” komponen pengendalian intern terdiri dari:

- a. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian intern adalah hal yang mendasar dalam komponen pengendalian intern.lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan,kebijakan,prosedur mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak direktur dan dewan komisaris dan pemilik suatu satuan usaha tersebuta(Alvin A Arens dan James K Loebbecke (2000 : 261). Dari pengertian lingkungan pengendalian intern tersebut,dapat diketahui efektivitas pengendalian dalam suatu organisasi terletak pada sikap manajemen.lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsure pengendalian intern lainnya yang membentuk disiplin dan struktur organisasi.
- b. Penilaian resiko. Menurut hall singleton (2007 : 29) “perusahaan harus melakukan penelitian resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan dan desain serta implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk pengendalian resiko adalah untuk menentukan untuk bagaimana cara mengatasi resiko yang telah diidentifikasi
- c. Informasi dan komunikasi. Menurut Mulyadi dalam bukunya auditing (2008:179-180) ”sistem akuntansi yang efektif adalah sistem

akuntansi yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat dan terjadi adalah :

1. Sah
2. Telah diotorisasi
3. Telah dicatat
4. Telah dinilai secara wajar
5. Telah digolongkan secara wajar
6. Telah dicatat dalam periode seharusnya
7. Telah dimasukkan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

Komunikasi menyangkut penyampaian informasi kepada semua orang yang terlibat didalam pelaporan keuangan agar mereka memahami bagaimana aktifitasnya berhubungan dengan pekerjaan orang lain, baik dalam organisasi maupun diluar organisasi

d. Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai resiko yang telah diidentifikasi perusahaan diantaranya :

1. Otorisasi transaksi
2. Pemisahan tugas
3. Catatan akuntansi
4. pengendalian akses
5. verifikasi independen

- e. Pemantauan adalah proses penilaian kinerja struktur pengendalian secara periodik dan terus menerus. Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang seharusnya melakukan kegiatan tersebut baik tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat. Tujuannya adalah untuk melakukan apakah pengawasan intern telah beroperasi sebagaimana yang telah diperbaiki sesuai dengan perubahan keadaan. pemantauan dapat dilakukan oleh bagian khusus yang disebut dengan bagian pemeriksaan intern (*auditing internal*)

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Suatu pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan orang lain atau badan yang memberikan, kepada orang lain atau badan yang telah diberikan kredit harus memenuhi segala kewajiban pada waktunya. Orang atau badan yang memberikan kredit disebut kreditur, sedangkan orang atau badan yang menerima kredit disebut debitur.

Menurut Hasibuan, Manajemen Perbankan (1996:46) bahwa kredit adalah “semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali bunganya oleh peminjam. Dalam hal ini, pihak bank memberi tarif bunga atau yang disebut bunga kredit dalam setiap permohonan kredit kepada pihak peminjam”

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998 pada dasarnya merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya untuk pembiayaan kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunganya.

Menurut kasmir (2014:73-73) menyatakan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

b. Tujuan Kredit

Menurut Kasmir, (2014:98) menyatakan “pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dalam pemberian kredit tidak lepas dari misi bank tersebut didirikan” adapun tujuan utama dari pemberian kredit adalah:

- a) Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga

yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

- b) Membantu nasabah tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan model tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c) Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik pula mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.
- d) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank.
- e) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha baru yang akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- f) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang atau jasa yang beredar dalam masyarakat.
- g) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- h) Meningkatkan devisa negara, apabila produk kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

c. Fungsi-fungsi kredit

- a) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan memberikan kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan uang atau jasa oleh si penerima kredit.
- b) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang akan disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah akan mendapatkan tambahan uang dari daerah lainnya.
- c) Kredit dapat meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.
- d) Kredit dapat meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat juga sebagai memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e) Kredit merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi negara karena dengan adanya kredit yang diberikan oleh perbankan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

- f) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Bagi si penerima kredit tentunya akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apabila bagi sinasabah yang memang modalnya pas-pasan.
- g) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin membaik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Kredit merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional, dalam hal pinjaman internasional akan meningkatkan rasa saling membutuhkan antara sipenerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

d. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014: 98) menyatakan bahwa “Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didirikan atas kepercayaan. Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan yang berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si pemberi kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”.Unsur-unsur dalam pemberian kredit :

- a) Kepercayaan. Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa akan benar-benar diterima dan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- b) Adanya dua belah pihak. Yaitu, pemberi kredit dan penerima kredit. Hubungan debitur dan kreditur merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.
- c) Waktu. Masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dan kontraprestasi yang diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini terkandung nilai dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang diterima pada masa yang akan datang.
- d) Kesempatan. Di samping unsur kepercayaan dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesempatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- e) Resiko. Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara si pemberi prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari semakin lama kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat resiko.
- f) Balas jasa. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa sering kita dengar dengan bunga atau biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang gadai. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), dan lain sebagainya.

e. Aspek-aspek Penilaian Kredit

Menurut Hasibuan (2011) menyatakan bahwa suatu kredit layak atau tidak penilaian dapat diberikan dengan menilai suatu aspek yang ada. Aspek-aspek yang dinilai antara lain :

- a) Aspek Yudiris (hukum). Yang dinilai aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit, mulai dari keabsahan dan kesempurnaan akta pendirian pendirian perusahaan sampai kepada dokumen atau surat-surat penting lainnya.
- b) Aspek Pasar dan Pemasaran. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:
 - a. Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang lalu.
 - b. Rencana penjualan dan produksi 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang.
 - c. Peta kekuatan yang ada.
 - d. Prospek produk secara keseluruhan.
- c) Aspek Keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu dibuatkan cash flow keuangan perusahaan yang akan memperlihatkan pendapatan dan beban-beban sehingga dapat dilihat layak atau tidaknya usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan.

- d) Aspek Teknis/Operasi. Yang merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan lay out seperti kapasitas mesin yang digunakan.
- e) Aspek Manajemen. Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya.
- f) Aspek Sosial Ekonomi. Merupakan aspek yang menganalisis dampak yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat secara umum seperti :
 - a. Meningkatkan ekspor barang atau menguirangi ketergantungan terhadap impor.
 - b. Mengurangi pengangguran.
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana.
 - e. Membuka isolasi daerah tertentu.

f. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut kasmir, (2014 : 98) faktor-faktor yang mempengaruhi pihak bank atau perusahaan gadai dalam menilai si pemohon kredit adalah:

a) Karakter (*character*)

Kemampuan si pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan. Dalam hal karakter, yang telah sifat, kebiasaan, kepribadian, cara hidup, dan keadaan keluarga.

b) Kemampuan (*capacity*)

Kesanggupan si pemohon untuk mengembalikan pinjaman dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya.

c) Modal (*capital*)

Penyelidikan terhadap modal si pemohon tidak hanya ditinjau dari segi besar kecilnya yang di tanam tetapi bagaimana penyebaran pembagian di dalam alat-alat produksi.

d) Jaminan (*colleteral*)

Untuk keamanan pelunasan debitur harus memberikan jaminan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

e) Kondisi (*condition*)

Dalam pemberian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalani.

g. Faktor Penting Kebijakan Kredit

Menurut Rivai, (2006 : 97) faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat.

a) Salah satu upaya lebih mengarahkan agar pengkreditan bank didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pengkreditan yang jelas.

b) Kebijakan pengkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pengkreditan bank

- c) Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan pengkreditan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d) Kebijakan pengkreditan bank dikatakan baik apabila minimal kebijakan kredit itu mencakup :
 - a. Prinsip kehati-hatian pengkreditan
 - b. Organisasi dan manajemen pengkreditan
 - c. Kebijakan persetujuan pengkreditan
 - d. Dokumentasi dan administrasi
 - e. Pengawasan kredit
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah

h. Prosedur dalam pemberian kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya menurut pertimbangan masing-masing. Memberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya atukah untuk konsumtif atau produktif.

- a) Tahap prakarsa atau permohonan kredit
 - a. Kegiatan prakarsa permohonan kredit. Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit dari nasabah atau memprakarsai kredit baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan persyaratan kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit.

Permohonan kredit diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/ calon nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada). Pejabat pemrakarsa kredit selanjutnya kemudian melakukan kegiatan informasi selengkap-lengkapnyanya dari berbagai sumber mengenai pemohon.

- b. Kegiatan analisa dan permohonan kredit. Dari data yang diperoleh dari pejabat pemrakarsa melakukan analisa dan evaluasi tingkat resiko kredit. Analisa dan evaluasi dituangkan kedalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya tentang informasi identitas pemohon, tujuan permohonan kredit, dan riwayat hubungan bisnis dengan bank. Analisis yang dilakukan oleh pemrakarsa meliputi 5 C yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisa kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima atau ditolak.
- c. Perhitungan kebutuhan kredit. Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kredit yang kelebihannya diluar usaha atau terjadi

kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. apabila bank ingin mengetahui kepastian kredit yang dibutuhkan oleh pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan yang dibuat konsultan atas beban biaya pemohon.

- d. Pembagian resiko kredit. Dalam upaya mengurangi resiko kredit yang harus ditanggung, bank harus membagi resiko tersebut dengan perusahaan asuransi, yaitu dengan menggunakan asuransi kredit, asuran kerugian maupun asuransi jiwa untuk debitur.
- e. Negoisasi kredit. Setelah langkah-langkah diatas, tahap selanjutnya adalah menguji kekuatan, kelemahan dan identifikasi resiko yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan analisa kredit. Kesimpulan tersebut harus mencakup antara lain pejabat pemrakarsa dapat menyimpulkan bahwa usaha debitur yang akan dibiayai mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, identifikasi resiko-resiko yang akan mengancam kelangsungan usaha pemohon atau merupakan titik kritis dari usaha yang akan dibiayai, serta melakukan antisipasi terhadap resiko-resiko tersebut yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan kredit. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan selanjutnya pejabat pemrakarsa melakukan negoisasi dengan calon nasabah.

b) Tahap pemberian rekomendasi kredit

Rekomendasi kredit dibuat pejabat perekomendasi kredit berdasarkan analisa/evaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa kredit. Dalam memberikan rekomendasi kredit, pejabat perekomendasi dapat

meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa kredit. Disamping itu pejabat pemrakarsa kredit juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk meyakinkan data/keterangan-keterangan yang telah disajikan akurat.

c) Tahapan pemberian keputusan

Pemberian keputusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus kredit atau pemutus kredit dari direksi bank. Sebelum melakukan pemutusan kredit pejabat pemutus kredit harus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit.

f) Tahapan persetujuan pencairan kredit

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat administrasi kredit sebagai pembuat instruksi dan disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Adapun syarat untuk menerbitkan instruksi pencairan kredit adalah surat pencairan kredit dan surat perjanjian *accessoir* yang telah mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya dan telah memberikan perlindungan pada bank, serta semua biaya-biaya yang berkaitan dengan keputusan kredit telah dilunasi oleh pemohon.

3. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Kesimpulan
Dita oktaviani	Analisis sistem pemberian kredit modal kerja sebagai salah satu upaya mendukung pengendalian intern kredit studi pada PT BRI (PERSERO) Tbk. Unit pemekasan kota.	Pada saat pelaksanaan sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh pegawai bank sudah mempunyai uraian tugas yang jelas tetapi, dalam aktivitas pengendalian masih ada penumpukan tugas pada fungsi account officer dalam melakukan analisa kredit.
Haninun	Pengaruh pengendalian intern pengkreditan terhadap kredit bermasalah pada PT BRI (PERSERO) Tbk. Cabang teluk betung	Berdasarkan analisa kuantitatif terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel intern pengkreditan terhadap variabel kredit bermasalah yang ditunjukan koefisien korelasi sebesar 0,798 besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat sebesar 63,60

B. Kerangka Berfikir

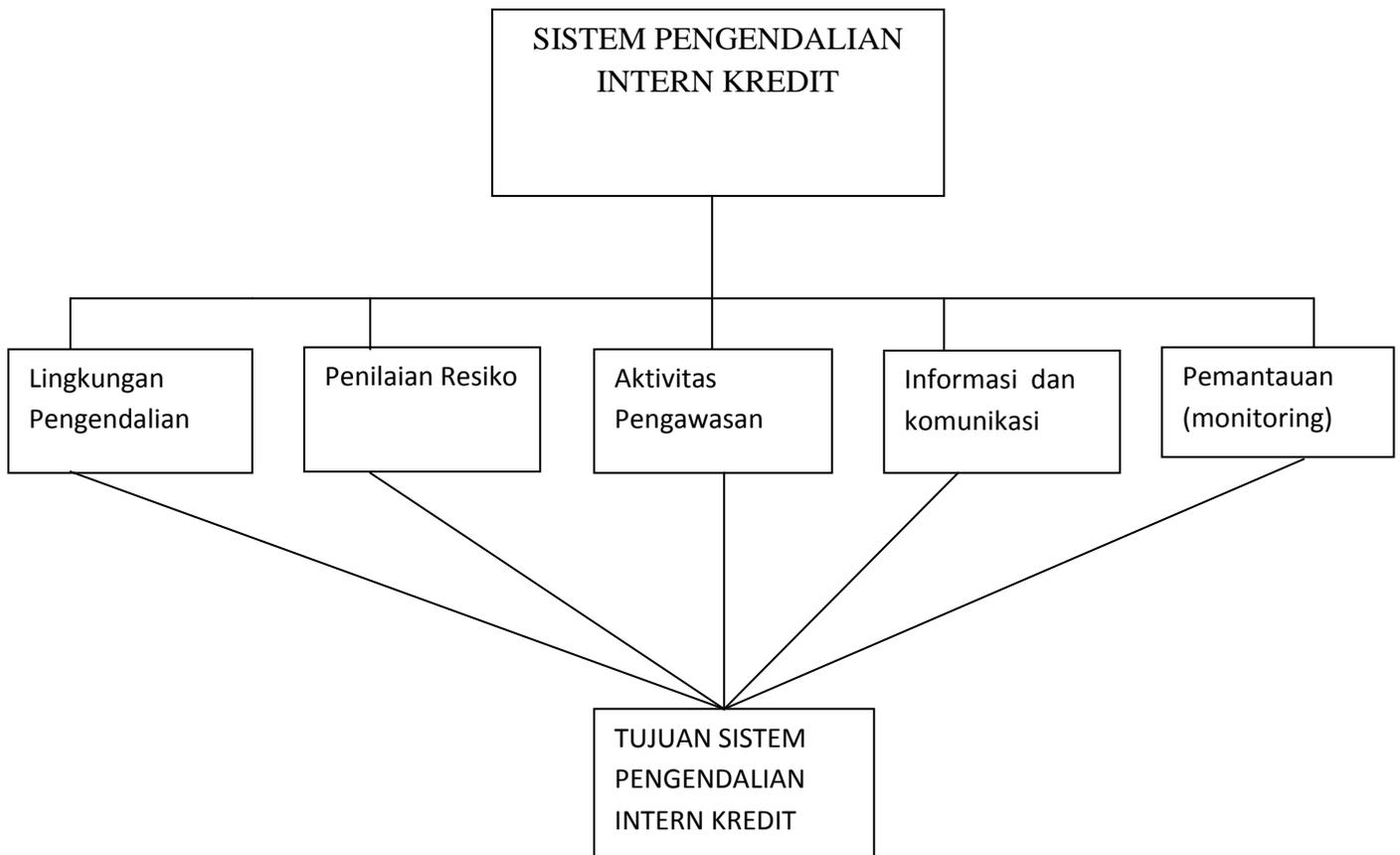
Adanya kebijakan pemberian kredit yang diterapkan akan menjadi tolak ukur terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan pengkreditan diterapkan untuk mengatasi kemungkinan risiko kredit yang bermasalah.

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir mengenai analisis sistem pengendalian intern kredit pada PT.Bank Rakyat

Indonesia (persero), Tbk Unit Kota Pinang secara sistematis pada gambar berikut ini :

Gambar II.I

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan logika berdasarkan fakta yang ada untuk dianalisis berdasarkan literatur- literatur yang dapat diartikan menjadi sebuah kesimpulan dengan demikian metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sistem pengendalian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Unit Kota pinang.

B. Defenisi Operasional

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Kredit merupakan dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Unit Kota Pinang

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2016 sampai Maret 2017.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.I

Tempat dan Waktu Penelitian

	KETERANGAN	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset				■																
2	Pengajuan Judul					■															
3	Penulis Proposal						■	■	■												
4	Bimbingan Proposal										■	■									
5	Seminar Proposal											■									
6	Penulisan Skripsi												■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																		■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis Data dan sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen perusahaan dan data yang telah dikelola oleh perusahaan.

2. Sumber Data

- a. Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberika data kepada pengumpul data ataupun sumber lain. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa sejarah perusahaan, sistem dan prosedur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Unit Kota Pinang
- b. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Penulis mendapatkan data secara langsung dari pihak terkait sebelum diolah penulis. Data primer didapatkan dengan teknik pengumpulan data wawancara / interview.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Wawancara, yakni dengan memberikan pertanyaan tentang pelaksanaan dan pemberian Kredit kepada pihak- pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi.

2. Dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dan penggandaan data sekunder seperti dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan seperti, prosedur pemberian kredit, dan perkembangan kredit bermasalah dan dokumen pendukung lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menggolongkan, mengumpulkan, menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Teknik analisis data dimulai dengan :

1. Mengumpulkan data keuangan yang berhubungan dengan penelitian seperti data kolektibilitas kredit yang disalurkan, kredit lancar dan kredit macet dan data prosedur pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang
2. Mewawancarai pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang
3. Menganalisis dan menyimpulkan hasil data yang diteliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 16 Desember 1895, R. Patih Wiriaatmadja dan kawan-kawan mendirikan “*De Poerwokerto Hulp-en Spaarbank Der Inlandsche Hoofden*” (Bank Priyayi Purwokerto) dengan akte otentik dibuat oleh E. Sienburgh. Tahun 1896 W. P. D. De Wolff Van Westerrode mendirikan “*De Poerwokertosche Hulp Spaarbank Landbouwcredietbank*” sebagai lanjutan dari Bank Priyayi Porwekerto.

Pada tahun 1898, banyak *Volkbanken* yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatannya, sehingga Pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dengan mendirikan *Dienst Der Volkscredietwesen* atau Dinas Perkreditan Rakyat.

Pada tahun 1912-1939, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga berbadan hukum yaitu “*Centrale Kas*” yang berfungsi sebagai Bank Desa. Sebagai akibat resesi dunia tahun 1929-1932, banyak *Volkbanken* atau Bank Rakyat yang tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka pada tahun 1932 didirikan *Algemeene Volkscredit Bank* (AVB) berstatus sebagai badan hukum yang aturannya mengacu pada aturan Eropa. Pada masa pendudukan Jepang, di pulau Jawa AVB diganti namanya menjadi *Syoomin Ginko* (Bank Rakyat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tanggal 3 Oktober 1912.

Setelah proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tanggal 22 Februari 1946, ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank pemerintah yang semula berturut-turut bernama *Algemeene Volkscredit Bank* (AVB) dan Syoomin Ginko.

Perkembangan sejarah politik di Indonesia ternyata membawa pengaruh terhadap pengembangan sejarah Bank Rakyat Indonesia. Pada tanggal 20 April 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1951 yang menjadikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank menengah. Adanya Dekrit Presiden, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 41 tahun 1960 mengenai pembentukan Bank Koperasi, Bank Tani, dan Bank Nelayan yang disingkat BKTN.

Dalam bank itu seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan menjadi:

1. BRI, berdasarkan PERPU Nomor 41 Tahun 1960 tanggal 22 Oktober 1960.
2. PT Bank Tani Nelayan, berdasarkan PERPU Nomor 43 Tahun 1960 tanggal 21 Oktober 1960.
3. Netherlandsche Handels Maatschappij (NHM) yang dinasionalisasikan berdasarkan PERPU Nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261206/BUM II tanggal 30 September 1960, diserahkan kepada Bank Koperasi, Bank Tani, dan Bank Nelayan.

Belum sampai integrasi ketiga bank tersebut dilaksanakan, semua Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penetapan Presiden Nomor

8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 disatukan dengan Bank Indonesia, sebagai salah satu langkah kebijaksanaan pemerintah menuju Bank Tunggal. BKTN diintegrasikan pula ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 9 tahun 1965 dan surat menteri Nomor 42 Tahun 1965 serta Nomor 47 Tahun 1965.

Pada akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor Keputusan: S. 67-DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982, Direksi Bank Rakyat Indonesia menetapkan bahwa hari jadi Bank Rakyat Indonesia adalah tanggal 16 Desember 1985. Kemudian dengan adanya kebijaksanaan pemerintah tentang perubahan bentuk badan hukum bank-bank milik pemerintah berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), berdasarkan akta pendirian (anggaran dasar) yang dimuat dalam akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H. Notaris di Jakarta.

Adapun fungsi Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan misi bank yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bank umum dan bank devisa.
2. Sebagai agent of development dalam bidang pertanian, nelayan, dan koperasi.
3. Sebagai penghimpun dana masyarakat.

b. Aktivitas Usaha

Usaha yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia merupakan kegiatan yang berupa pelayanan pinjaman dana jasa. Untuk lebih jelasnya kegiatan usaha Bank Rakyat Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Usaha Simpanan

- a. Giro
- b. Deposito
- c. Tabanas BRI
- d. Simpedes
- e. Simaskot

2. Usaha Jasa Bank

- a. Dalam Negeri
 - a) Pengiriman uang dalam negeri
 - b) Wesel
 - c) Inkaso
 - d) Jaminan uang
- b. Luar Negeri
 - a) Ekspor impor
 - b) Pengiriman uang luar negeri
 - c) Jual beli valuta asing, travel check
 - d) Penagihan (collection)
 - e) Jaminan bank

3. Usaha Pinjaman

- a. Kredit Prioritas

- a) KUK (Kredit Usaha Kecil)
 - b) KUPEDDES (Kredit Umum Pedesaan)
 - c) KUT (Kredit Usaha Tani)
- b. Kredit Non Prioritas
- a) KIB (Kredit Investasi Besar)
 - b) KREMUNA (Kredit Multi Guna)
 - c) Industri/perdagangan
 - d) Konstruksi
 - e) Pegawai pensiun
 - f) Jasa-jasa
4. Jasa Bank Lainnya
- a. Penerimaan Setoran
 - a) ONH
 - b) Pajak, bea, dan cukai
 - b. Penyaluran Dana
 - a) PT TASPEN
 - b) Subsidi pembangunan
 - c) Perum Pos dan Giro
 - d) PT Telkom
 - e) PLN
 - f) TNI AD
 - g) Iuran TV
 - h) Biaya Pembuatan SIM

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembangunan di Indonesia pada umumnya memegang peranan penting untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan kelancaran penyaluran dana dari pemerintah.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu sistematika penyusunan kedudukan dalam perusahaan. Struktur organisasi terdiri dari pembagian tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian karyawan yang disesuaikan dengan keahliannya. Struktur organisasi bertujuan untuk mendapatkan suatu sistem kerja sama antar karyawan dengan baik dan berguna bagi perusahaan. Agar mempermudah pengawasan, atasan memberikan pekerjaan yang layak kepada seluruh karyawan sesuai dengan keahlian karyawan. Berikut ini adalah struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Kota Pinang. Struktur organisasi perusahaan berbentuk garis dan staf berdasarkan fungsi.

1. Kepala BRI Unit (KAUNIT)

Adapun tugas dan wewenang Kepala BRI Unit (KAUNIT) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Unit bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaan sesuai dengan prosedur
- b. Mendiskusikan Rapat Kerja Anggaran dengan Unit Bisnis Manajerial dan menegosiasikan dengan Pimpinan Cabang
- c. Melaksanakan prosedur kredit
- d. Mengoptimalkan Kinerja BRI Unit

- e. Berperan serta aktif dalam pengembangan bisnis serta menjalin hubungan profesional dengan debitur dan dana dari masyarakat yang terkait
 - f. Menyampaikan Masalah yang berkaitan dengan kredit kepada atasannya.
 - g. Bertanggung jawab atas kebenaran analisis kredit yang akan diputus Assistant Manajer Bisnis Mikro atau Pimpinan cabang dan memutus kredit sesuai dengan kewenangannya.
2. Supervisor
- a. Membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan
 - b. Mengatur dan bertanggung jawab dalam hasil kerja staf
 - c. Membuat rencana pekerjaan harian, mingguan, bulanan dan tahunan
 - d. Berperan dalam pengeluaran maupun pemasukan yang berkaitan dengan proses operasional maupun kredit
3. Mantri-Mantri
- Adapun tugas dan wewenang Mantri adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan prosedur kredit di unit kerjanya.
 - b. Mempelajari dan melakukan analisis terhadap potensi ekonomi di wilayah kerjanya.
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana bisnis prioritas terhadap debitur dan menetapkan prioritas pembinaan atas debitur yang dikelolanya

- d. Bertindak sebagai pemrakarsa atau penganalisa atau rekomendasi untuk setiap permohonan kredit
- e. Melaporkan situasi dan kondisi debitur baik yang masih lancar maupun memburuk serta memberikan usul dan saran penanggulangannya.

4. Customer Service

Adapun tugas dan wewenang Customer Service adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan tentang produk bank
- b. Mengarsipkan segala dokumen dan mengadministrasikan dokumen yang terkait
- c. Melayani dan mengatasi permasalahan nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan dan pelayanan
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditunjuk oleh atasan.

5. Teller

Adapun tugas dan wewenang Teller adalah sebagai berikut:

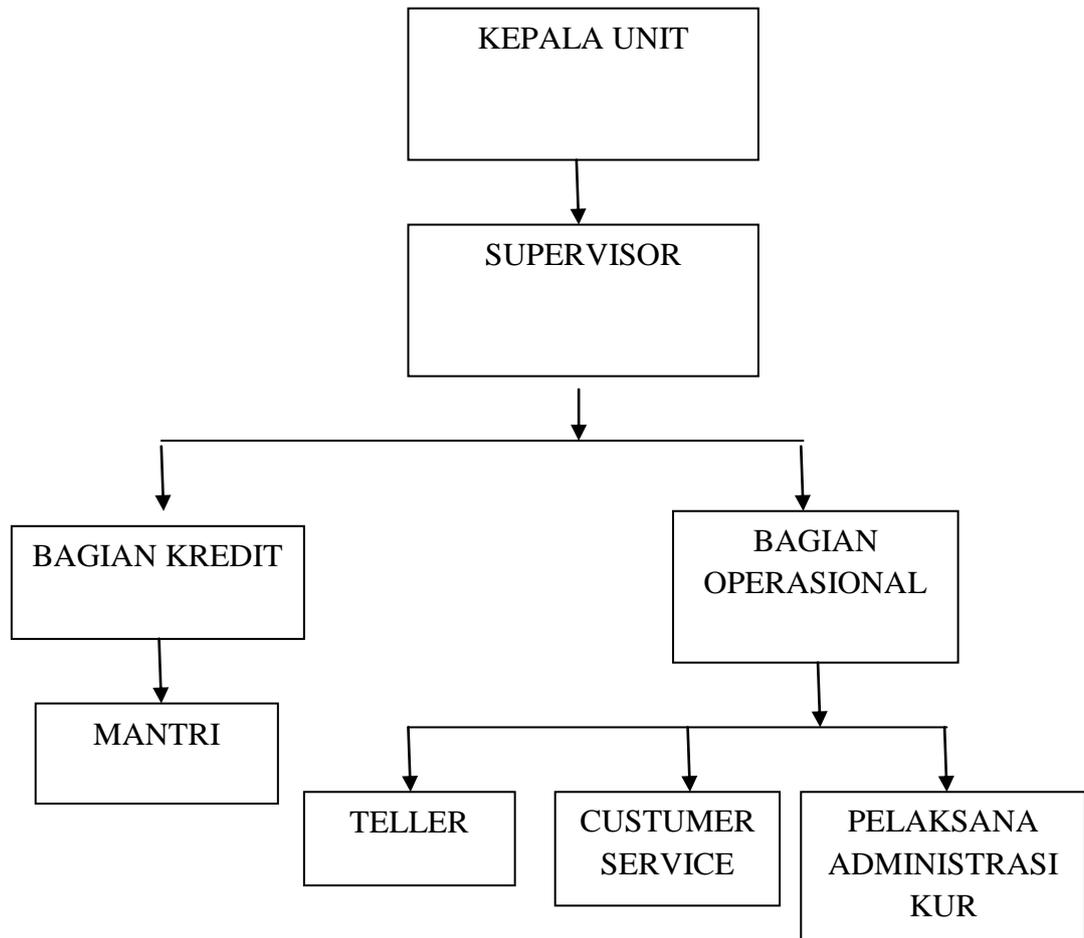
- a. Memeriksa kelengkapan transaksi yang ditangani dan memeriksa saldo uang tunai teller pada cash box
- b. Melayani nasabah dalam transaksi finansial yang bersifat fisik
- c. Pengaturan uang tunai dan penyelesaian proses transaksi
- d. Mencekkan formulir dengan dokumen asli untuk memastikan tanda tangan tersebut sah.

6. Pelaksana Administrasi KUR (PAKUR)

Adapun tugas dan wewenang Pelaksana Administrasi KUR (PAKUR) adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menyediakan dan mengolah data-data yang berkaitan dengan KUR dan memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumentasi kredit
- b. Mengelola berkas pinjaman KUR dan menyiapkan dokumen pembukuan kredit untuk proses penyelesaian operasional administrasi KUR
- c. Membuat laporan dengan analisis sederhana

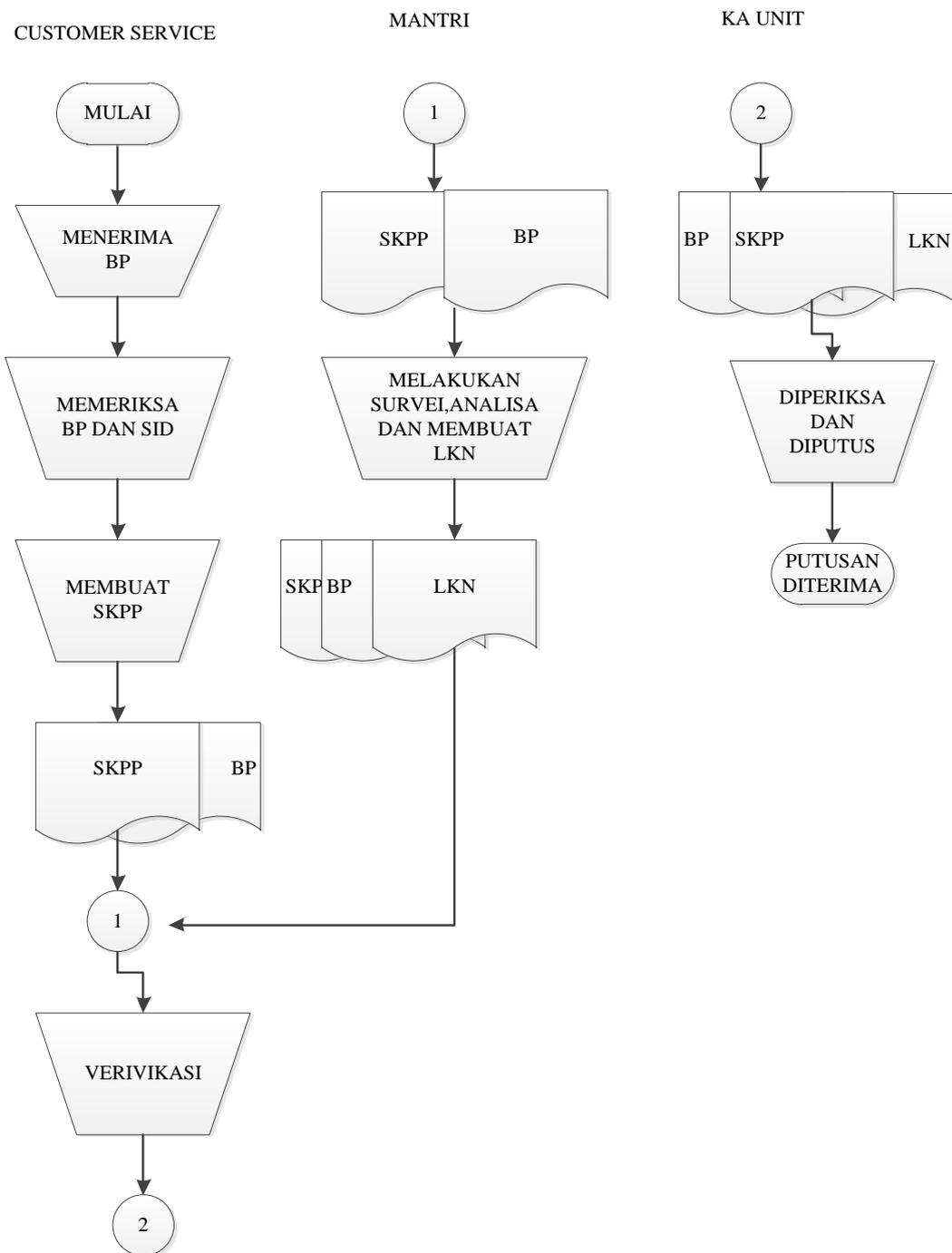
Gambar IV.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT KOTA PINANG

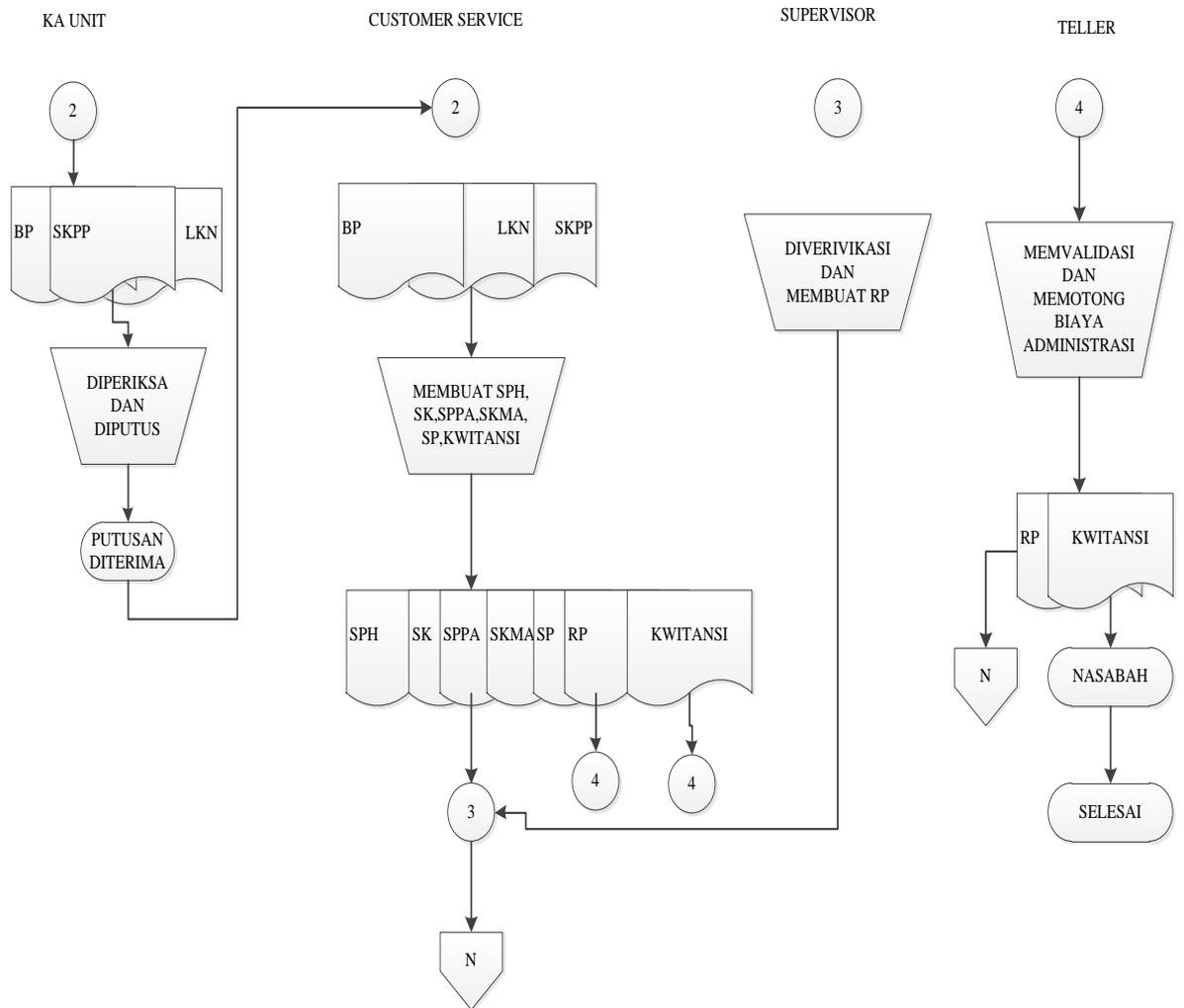


2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kota Pinang.

GAMBAR 1V.1

FLOWCHART PEMBERIAN KREDIT





Proses pemberian kredit yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia terbagi atas beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Permohonan Kredit

- a. Nasabah yang ingin mengajukan kredit datang ke bank dengan membawa berkas persyaratan yang diperlukan.
- b. Customer Service (CS) menerima nasabah yang membawa persyaratan pengajuan kredit. Berkas-berkas kredit yang dilampirkan terdiri dari formulir pendaftaran, fotokopi suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi jaminan, pas photo, tanda lunas PBB, Surat keterangan usaha dari Kelurahan (ditandatangani dan disetempel Kelurahan).
- c. Setelah memeriksa kelengkapan berkas, CS melakukan BI checking (Sistem Informasi Debitur atau SID) yang di input melalui komputer.
- d. Setelah SID keluar maka CS membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), dan pada map yang berisikan berkas nasabah diberi nomer pangkal yang sudah ada pada bank.
- e. Nomer pangkal dan nomer register SKPP ditulis pada formulir pendaftaran Kredit.
- f. Berkas nasabah yang sudah diberi nomer pangkal dan sudah memenuhi kelengkapan, CS menyerahkan berkas nasabah kepada Mantri.
- g. menyerahkan kepada Mantri (AO) untuk ditindak lanjuti dan Mantri (AO) melakukan penilaian awal atas berkas.

- h. Setelah itu, mantri melakukan kunjungan lapangan (*survey*) di lokasi tempat usaha nasabah, dengan membawa berkas-berkas yang diajukan sebelumnya.
 - i. Pada saat pelaksanaan *survey*, mantri melakukan analisis dan evaluasi terhadap keadaan nasabah, termasuk dengan keadaan usaha nasabah. Analisis yang digunakan berdasarkan pada prinsip pemberian kredit yaitu analisis 5C.
 - j. Setelah mantri melakukan *survey*, dan melakukan analisis serta mengevaluasi keadaan nasabah maka mantri membuat laporan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), di dalam LKN juga sudah disertakan rekomendasi kredit yang dapat direalisasi oleh BRI. LKN dibuat 1 lembar dan setelah itu dimasukkan ke dalam berkas nasabah yang bersangkutan.

Setelah mantri membuat LKN dan dimasukkan ke dalam berkas, selanjutnya berkas direkomendasikan kepada CS untuk di verifikasi.
2. Prosedur persetujuan kredit
- a. CS menerima berkas tersebut dan melakukan verifikasi, verifikasi yang dimaksudkan adalah memeriksa data nasabah yang sudah dimasukkan oleh mantri pada sistem yang sudah ditentukan oleh pihak BRI.
 - b. Setelah berkas di verifikasi oleh CS maka berkas nasabah akan diserahkan kepada Ka. Unit untuk putusan kredit

- c. Ka. Unit menerima berkas tersebut dan kemudian diberikan putusan diterima atau ditolak kredit yang diajukan, apabila dari laporan survey mantri terdapat masalah, maka akan segera diputus.
 - d. Setelah berkas tersebut diputus oleh Ka. Unit maka berkas tersebut akan diserahkan kembali kepada CS.
 - e. Apabila Ka. Unit memutuskan menolak kredit tersebut maka CS akan menghubungi pihak nasabah dan memberitahukan kredit yang diajukan tidak diterima. Apabila Ka. Unit menyetujui kredit yang diajukan tersebut maka berkas diserahkan ke CS untuk segera ditindak lanjuti.
3. Prosedur pencairan dan administrasi kredit
- a. CS menghubungi nasabah memberitahu apabila kredit yang diajukan diterima, dan pihak bank juga memberitahu nasabah agar datang ke bank dengan membawa materai 6000 sebanyak 3, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli suami dan istri, buku tabungan (Apabila nasabah sebelumnya sudah mempunyai buku tabungan atau rekening aktif pada BRI Unit Kota Pinang), jaminan asli, buku nikah suami dan istri, Kartu Keluarga (KK).
 - b. Nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan yang sudah diberitahu sebelumnya, dan CS membuat Surat Perjanjian Hutang (SPH), Surat Kuasa, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA), Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA), Surat pernyataan kredit, Surat Kuasa Menjual Agunan, kwitansi biaya. CS memasukkan data jaminan pada buku register.

- c. Setelah CS selesai membuat Surat Perjanjian Hutang (SPH), Surat Kuasa, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) yang ditandatangani oleh Kepala Unit, Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA), Surat Pernyataan, dan kwitansi kredit, maka nasabah menandatangani semua berkas tersebut dan kemudian dikembalikan ke CS.
- d. Kemudian, CS memberikan seluruh berkas-berkas tersebut kepada supervisor (SPV) untuk diverifikasi dan membuatkan nasabah rekening pinjaman.
- e. CS membawa kwitansi yang digunakan teller untuk divalidasi dan sebagai arsip yang disimpan untuk teller.
- f. Teller memvalidasi kwitansi tersebut dan setelah memvalidasi, teller memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menerima uang dan buku tabungan. Nasabah secara otomatis memiliki rekening kredit yang tersimpan di dalam database BRI.
- g. Setelah nasabah menerima uang dan buku tabungan, maka nasabah dapat kembali ke rumah

B. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya mengenai sistem pengendalian intern persediaan suku cadang, maka dibawah ini akan dibahas berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian intern berdasarkan COSO (*The Committee of Sponsoring Organization*).

a. Lingkungan Pengendalian

Hasil dalam penelitian ini, berdasarkan pertanyaan yang ada dalam daftar wawancara, mengenai lingkungan pengendalian yang dijalankan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang sudah berjalan dengan baik. Struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang menerangkan bahwa setiap bidang yang ada sudah berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan, dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan setiap tanggung jawab yang diberikan. Struktur organisasi sangat penting dalam setiap perusahaan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang telah memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah berjalan dengan baik.

Seluruh perusahaan yang baik harus memiliki komite audit yang secara keseluruhan terdiri dari para komisaris (non pegawai) dari luar perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian intern perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhan terhadap hukum,

peraturan, dan standar yang terkait Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang. Komite audit tersebut adalah *Residence Auditor Unit* (RAU)

Sedangkan lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang memperlihatkan sikap manajemen, atasan dan seluruh sistem pengendalian yang ada di perusahaan. Menurut Mulyadi (2002, hal 183), berikut ini adalah faktor-faktor lingkungan pengendalian dalam perusahaan: Integritas dan nilai-nilai etika; Komitmen pada kompetensi; Partisipasi dewan komisaris atau komite audit; Filosofi dan gaya operasi manajemen; Struktur organisasi; Pemberian wewenang dan tanggung jawab; Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Menurut Marshall (2011, hal 232), lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini: komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi, struktur organisasional, badan audit dewan komisaris, metode untuk memberikan otorisasi dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia, dan pengaruh-pengaruh eksternal.

Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika merupakan hal yang sangat penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika perusahaan. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikkannya. Pihak manajemen harus mengembangkan kebijakan yang tertulis dengan jelas, yang secara eksplisit menjelaskan perilaku yang jujur dan tidak jujur.

Didalam perusahaan seharusnya seluruh tindakan yang jujur dan yang tidak jujur harus secara menyeluruh diinvestigasi, dan mereka yang bersalah harus dibebaskan tugasnya. Pegawai yang tidak jujur harus dituntut untuk membuat pegawai mengetahui bahwa perilaku semacam ini tidak akan diperbolehkan oleh perusahaan.

b. Penaksiran risiko

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai penaksiran risiko, dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang menyatakan bahwa sudah melakukan penaksiran risiko secara efektif, dengan cara menganalisa segala sesuatu yang memungkinkan mengakibatkan risiko tidak dapat bayar oleh nasabah yang dilakukan mantri serta menerapkan prinsip 5 C untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dengan menerbitkan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang didalamnya terdapat Laporan Laba/Rugi, Neraca dan Penilaian Agunan yang dilakukan pada saat pengajuan kredit.

Semua perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti menghadapi risiko internal maupun risiko eksternal dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan. Kredit macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang dipengaruhi risiko internal dan risiko eksternal:

a. Risiko internal

Terjadinya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang dikarenakan pihak analisis kurang teliti dalam penganalisisannya sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dan pihak analisis yang kurang efektif dalam

menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga analisis dilakukan secara subjektif dengan tidak memperhitungkan resiko yang akan terjadi.

b. Risiko eksternal

Terjadinya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang dikarenakan nasabah dengan tidak sengaja tidak membayar angsuran pinjaman akan tetapi tidak mampu dikarenakan masalah ekonomi yang membuat kegiatan usaha nasabah mengalami kesulitan seperti kena hama, kebanjiran, turunnya harga sawit yang menyebabkan panen mengalami penurunan, dan kebangkrutan usaha. Selain itu untuk nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran tepat waktu dan menunda-nunda pembayaran. Bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang akan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut:

a) *Rescheduling*

Merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.

b) *Reconditioning*

Merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian penjaminan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah.

c) Restructuring

Merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Namun, dalam pertanyaan wawancara lainnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang juga belum efektif dalam melakukan penaksiran resiko. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa dalam salah satu pertanyaan ada menanyakan tentang pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak, perusahaan belum melakukan hal tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Hery (2008, hal 168) pengecekan/pemeriksaan independen atau verifikasi internal dengan meninjau uang atau pun persediaan, dan pencocokan data yang disiapkan karyawan. Untuk memperoleh manfaat yang maksimum dari verifikasi internal, maka verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik atau berkala atau bisa juga atas dasar dadakan.

Manajemen perusahaan harus mengidentifikasi salah satu atau beberapa pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Dalam mengevaluasi keuntungan prosedur pengendalian internal tertentu, manajemen perlu mempertimbangkan keefektifan dan waktunya. Apabila semua faktor yang lainnya sama, maka pengendalian untuk pencegahan akan lebih baik daripada pengendalian untuk pemeriksaan. Tetapi, apabila pengendalian untuk pencegahan gagal, maka pengendalian untuk pemeriksaan penting untuk menemukan masalah, dan pengendalian korektif membantu mengatasi masalah tersebut. Jadi pengendalian untuk pencegahan, untuk pemeriksaan, dan korektif saling

melengkapi, dan sistem pengendalian internal baik perlu menggunakan ketiganya.

c. Aktivitas Pengendalian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara bahwa perusahaan sudah menerapkan prosedur yang telah ditetapkan akan tetapi adanya pihak internal yang tidak melaksanakan prosedur dengan baik diantaranya penilaian secara subjektif dan tidak melakukan peringatan tegas pada saat nasabah terlambat pembayaran lebih dari 90 hari Sehingga resiko terjadinya kredit macet semakin tinggi walaupun perusahaan telah melakukan pengawasan yang dilakukan minimal seminggu sekali tetapi pihak auditor tidak melakukan pemeriksaan secara dadakan. Sehingga kebijakan manajemen tidak terlaksana dengan baik. ini tidak bersesuaian dengan teori menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) dalam buku audit sistem informasi (2007, hal 270) menyatakan bahwa, salah satu komponen sistem pengendalian intern adalah aktivitas pengendalian yaitu kebijakan atau prosedur yang dirancang untuk memastikan diterapkannya kebijakan manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi prosedur otorisasi yang memadai, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan akuntansi yang memadai.

Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang setiap karyawan dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan perusahaan dan dokumen yang

digunakan sudah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan bernomor urut cetak sehingga dapat mempermudah pemakainya dalam mengelola data.

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan telah melakukan beberapa tindakan untuk melakukan aktivitas pengendalian, yaitu dengan dilakukannya pemisahan fungsi, adanya otorisasi pada setiap transaksi, kecukupan dokumen dan catatan, pengendalian catatan pada fisik dan aset, dan pemeriksaan independen atas setiap transaksi.

d. Informasi dan komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang, informasi bagi seluruh bagian kerja yang berbeda didapat dari catatan kredit dan formulir atau dokumen pemberian kredit yang sudah di tandatangani dan dicap, dicatat dan kemudiaan melaporkan kepada masing-masing pihak yang bertanggungjawab.

Informasi dan komunikasi adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan perusahaan serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait, untuk setiap transaksi, sistem akuntansi harus memenuhi tujuan audit.

Sesuai dengan teori Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) dalam buku audit sistem informasi (2007, hal 271) menyatakan

bahwa, salah satu komponen sistem pengendalian intern adalah informasi dan komunikasi yaitu sistem informasi hendaknya terintegrasi/terpadu, dan menjamin kebutuhan terhadap kualitas data. Informasi dan komunikasi meliputi kebijakan manajemen harus diinformasikan, harus disampaikan dengan jelas, dibuat policy manual, tata administrasi, standard pelaporan, adanya resiko yang mungkin timbul karena adanya bidang baru, perubahan sistem, atau teknologi baru, perkembangan pesat organisasi/entitas, aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan, sebagainya.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) dalam buku sistem informasi akuntansi (2015, hal 96) menyatakan bahwa, salah satu komponen sistem pengendalian intern adalah pengawasan kinerja. Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi: supervise yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, pengauditan internal. Pengauditan internal meliputi review terhadap reliabilitas dan integritas informasi operasional dan informasi financial, penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern, evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen dan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

e. Pemantauan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang. Nasabah yang mengalami kegagalan kredit dikarenakan mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan tingkat kredit macet mengalami kenaikan sedangkan bagi nasabah yang mengalami kredit macet pihak bank hanya memberi teguran pertama dengan cara menelpon nasabah kemudian setelah 120 hari petugas baru mendatangi rumah nasabah untuk memberikan peringatan kedua. Sedangkan, dapat dilihat bahwa teguran pertama tidak berjalan

dengan efektif. Pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan. Informasi yang dinilai ini berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian tentang aktivitas pengendalian, laporan dari pembuat peraturan seperti badan pengatur bank, umpan balik dari personil operasional, dan keluhan dari nasabah.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) dalam buku audit sistem informasi (2007, hal 272) menyatakan bahwa, salah satu komponen sistem pengendalian intern adalah pemantauan. Pemantauan merupakan proses yang menilai kualitas dari kinerja sistem dan *internal control* dari waktu ke waktu, yang dilakukan dengan melakukan aktivitas monitoring dan melakukan evaluasi secara terpisah. Terdapat dua mekanisme pemantauan yaitu pengawasan yang langsung dilakukan oleh masing-masing atasan pihak yang bersangkutan berdasarkan jenjang hirarki jabatan, dan pengawasan yang dilakukan oleh fungsi audit.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat dinyatakan bahwa semua unsur pengendalian intern kredit telah dilakukan. Secara keseluruhan penerapan sistem pengendalian intern kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang telah berjalan dengan efektif, namun ada juga beberapa unsur yang masih perlu dilakukan peningkatan pengawasannya. Penerapan tersebut sudah dapat sesuai dengan tujuan penerapan sistem pengendalian intern, adapun tujuan sistem pengendalian intern yaitu untuk memberikan keyakinan memadai dalam

pencapaian tiga tujuan, menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*), menyatakan bahwa:

a. Keandalan informasi keuangan.

Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan merupakan alat pengendali dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi.

c. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan sistem yang dapat membantu pemimpin perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga dapat diarahkan pada tingkat yang paling efisien dan efektif guna mencegah kecurangan, penyelewengan dan pemborosan. Pengendalian ini berfungsi apabila di dalamnya tercakup tujuan yang merupakan arah dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Melindungi harta kekayaan perusahaan.

2. Mengecek ketelitian dan catatan organisasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dijalankan oleh perusahaan.
3. Mendorong efisiensi kinerja perusahaan, sehingga dalam berbagai kegiatan dapat dilakukan penghematan.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas ditinjau dari penilaian kredit yang digunakan dalam pemberian keputusan kredit. Maka ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit yang dilihat pada penilaian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang telah menerapkan prinsip 5 C yaitu *character*, *capacity*, *colletral* dan *condition of economic*. Walaupun telah menerapkan prinsip 5 C tidak memberikan dampak yang baik bagi perusahaan, terlihat dari meningkatnya jumlah kredit macet yang terjadi.dalam penerapan penilaian pemberian kredit yang dilakukan,terdapat kendala dimana aspek *character* sulit untuk dianalisis terhadap seluruh nasabah, calon nasabah dapat memberikan informasi yang tidak kongkrit.
2. Aspek *capacity* dari survei awal yang dilakukan, usaha yang dijalani berkembang tetapi saat kredit berlangsung kemampuan usaha nasabah mengalami penurunan dan hal ini yang menimbulkan terjadinya kredit macet yang meningkat dikarenakan kemampuan nasabah mengalami penurunan dalam pembayaran kewajiban.begitu juga dengan aspek *colletral* atau jaminan yang diberikan oleh nasabah, walaupun jumlah jaminan yang diberikan oleh nasabah lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan tetapi bank memberikan waktu lebih untuk

tindakan melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut, sehingga dana produktif yang dimiliki bank mengalami penurunan

B. Saran

Dari semua yang diuraikan dalam pembahasan, melalui penelitian yang telah dilakukan serta memperhatikan kesimpulan yang diperoleh, maka Penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang berguna bagi perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang. Adapun beberapa saran yang ingin Penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Jika diperhatikan dari keseluruhan, maka sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang baik, meskipun demikian masih ada kelemahan dalam proses atau prosedur pengendalian pemberian kredit yaitu adanya perangkapan tugas *Account Officer* (AO) sebagai yang menganalisa juga sebagai pengawas kredit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah/debitur dengan pejabat *Account Officer* (AO) tersebut. Selain itu juga, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang harus memiliki sikap kehati-hatian agar tidak terjadi kendala serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pemberian kredit.
2. Dalam proses pemberian kredit, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota Pinang melakukan analisa terhadap aspek yaitu aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek teknis, aspek hukum dan agunan dari calon debitur, selain itu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Unit Kota Pinang juga melakukan analisa yang didasarkan pada prinsip 5 C yaitu *character, capacity, colletral* dan *condition of economic* tetapi mungkin lebih baik jika ada analisa terhadap 2 C yaitu *constrait* (faktor hambatan dan keterbatasan yang dapat timbul dalam pengkreditan) dan *Covering* (suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari adanya kerugian apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan).

3. Adanya penanganan terhadap pemberian teguran kepada nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran pinjaman baik masih dalam kolektibilitas tingkat 2 agar nasabah menjalankan kewajiban sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan tidak sampai kepada tahap kredi macet yaitu kolektibilitas tingkat 3,tingkat 4 dan tingkat 5.

DAFTAR WAWANCARA

Dengan segala kerendahan hati, saya mohon bantuan bapak/ibu untuk mengisi daftar wawancara ini dengan sejujur-jujurnya, untuk keperluan mengenai, “ Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Pinang”. Semoga bantuan bapak/ibu akan memberikan manfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

PETUNJUK MENJAWAB

Tandailah salah satu jawaban yang menurut bapak/ibu benar dengan mengikuti langkah-langkah dibawah ini :

1. Bacalah semua pertanyaan berikut ini dengan baik dan seksama.
2. Jawablah semua pertanyaan dari setiap bagian dengan cara memberikan tanda centang (jika perlu) pada salah satu kolom hasil observasi, pastikan semua pertanyaan telah bapak/ibu jawab

Nama Responden :

Jabatan :

Waktu :

Tanda Tangan :

No	Unsur wawancara	Ya	Tidak	Argumen
1	Apakah fungsi analisa kredit dan penagihan sudah dipisahkan?			
2	Apakah fungsi bagian pelayanan dipisahkan dengan fungsi administrasi kredit?			
3	Apakah sistem pengendalian intern kredit sudah berjalan sesuai prosedur pembelian kredit?			
4	Apakah prosedur kredit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?			
5	Apakah perusahaan melakukan pelatihan terhadap karyawan yang menangani bagian kredit?			
6	Apakah resiko yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam pemberian kredit? jelaskan cara penanganannya!			
7	Apa penyebab kegagalan kredit yang sering dialami oleh perusahaan ?			

8	Apakah ada surat keterangan penolakan kredit apabila ada nasabah yang tidak memenuhi syarat dalam pemberian kredit?			
9	Apakah ada pengawasan langsung yang dilakukan kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah?			
10	Apakah ada pemberian kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ?			
11	Apakah petugas kredit telah melakukan pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang ada diperusahaan dan telah melakukan pemberian kredit dengan berdasarkan prinsip 5 C ?			
12	Apakah ada pengawasan yang dilakukan untuk mengevaluasi petugas kredit ?			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Aprillia Kartika
NPM : 1305170259
Tempat dan tanggal lahir : Blok Songo, 25 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mukhtar Basri No.3 Medan
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Saleh
Nama Ibu : Budi Astusi
Alamat : Kota Pinang

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Raja Garuda Mas (RGM) Tamat tahun 2008
2. SMP Negeri 2 Kota Pinang Tamat tahun 2010
3. SMK Swasta Ki Hajar Dewantara Kota Pinang Tamat tahun 2013
4. Tahun 2013 - 2017, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2017

APRILLIA KARTIKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Ihsan
NPM : 1105170357
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 28 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Makmur Pasar VII Tembung
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Darwan
Nama Ibu : Sri Wirdani Nasution
Alamat : Jl. Merbuk No. 63 Kisaran

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Tamansiswa Kisaran Tamat tahun 2005
2. SMP Swasta Tamansiswa Kisaran Tamat tahun 2008
3. SMA Swasta Tamansiswa Kisaran Tamat tahun 2011
4. Tahun 2011 - 2015, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2015

MUHAMMAD IHSAN